

**STRATEGI PEMBERDAYAAN FORUM ANAK KOTA PALEMBANG
(FAKOPA) OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MENDUKUNG
PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA)
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Azzahra Khairunnisya

NPP. 32.0210

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: azzahrasmp27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. Juliati Prihatini, M.Si.

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): *There has been no increase in the KLA ranking carried out by DP3A through FAKOPA in Palembang City. **Purpose:** To analyze the new empowerment strategies used by DP3A towards FAKOPA in Palembang City. **Method:** The research method used is qualitative descriptive. Data analysis techniques are carried out through interviews, observations and documentation. The theory used is the empowerment strategy theory from Hulme and Turner (1990) in Karjuni Dt. Maani (2011). **Results:** The results of the study show that FAKOPA's empowerment strategy in the Empowerment Approach dimension includes regulations and policies on the organization and programs of Child-Friendly Cities. The Development Approach dimension includes training and coaching and participation in government events. The Welfare Approach dimension includes activity assistance and support. **Conclusion:** The FAKOPA empowerment strategy by DP3A Palembang City has included three approaches, namely Empowerment, Development, and Welfare. However, its implementation is still not optimal in empowering FAKOPA as a strategic actor to support the improvement of the KLA rating. The main inhibiting factors include the lack of activeness of FAKOPA members, the lack of budget allocation, and weak cross-sector synergy. Therefore, a new empowerment strategy is needed that is more participatory, directed, and integrated with KLA assessment indicators.*

Keywords: *FAKOPA, KLA, empowerment strategy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Belum adanya peningkatan peringkat KLA yang dilakukan oleh DP3A melalui FAKOPA di Kota Palembang. **Tujuan:** Untuk menganalisis strategi pemberdayaan baru yang digunakan oleh DP3A terhadap FAKOPA di Kota Palembang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori strategi pemberdayaan dari Hulme dan Turner (1990) dalam Karjuni Dt. Maani (2011). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan FAKOPA pada dimensi *Empowerment Approach* mencakup regulasi dan kebijakan tentang organisasi dan program Kota Layak Anak. Dimensi *Development Approach* mencakup pelatihan dan pembinaan dan keikutsertaan dalam acara pemerintah. Dimensi *Welfare Approach* mencakup pendampingan kegiatan dan pemberian dukungan.*

Kesimpulan: Strategi pemberdayaan FAKOPA oleh DP3A Kota Palembang telah mencakup tiga pendekatan, yaitu *Empowerment*, *Development*, dan *Welfare*. Namun, implementasinya masih belum maksimal dalam memberdayakan FAKOPA sebagai aktor strategis untuk mendukung peningkatan peringkat KLA. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya keaktifan anggota FAKOPA, minimnya alokasi anggaran, serta lemahnya sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan baru yang lebih partisipatif, terarah, dan terintegrasi dengan indikator-indikator penilaian KLA.

Kata Kunci: FAKOPA, KLA, strategi pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan harta bangsa yang tumbuh kembangnya memerlukan perhatian dan perawatan dari lingkungan sekitar agar menjadi pribadi berguna bagi bangsa (Gauthier et al., 2025; Hebert et al., 2023; King et al., 2024). Berhasil tidaknya masa depan bangsa akan bergantung kepada kualitas kondisi perkembangan anak-anak pada saat ini (Goto et al., 2022; Seraphin et al., 2022; Smolarczyk et al., 2024). Setiap anak mempunyai ciri khusus masing-masing yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya (Nasriana, 2011). Indonesia berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang sesuai untuk tumbuh kembang anak melalui kebijakan dan peraturan yang telah dibuat.

Organisasi Forum Anak (FA) adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan yang dibentuk pada tahun 2008 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Pelopor dan Pelapor yang bertugas menjembatani antara anak Indonesia dan pemerintah dengan memberikan ruang bagi anak-anak agar dapat menyuarakan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Forum Anak termasuk organisasi berjenjang, dimana Forum Anak Nasional (FAN) merupakan organisasi nasional yang dibina oleh Kementerian PPPA. Sedangkan di tiap daerah forum anak hadir baik ditingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan yang pembinaannya ditugaskan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), kecamatan dan kelurahan setempat (Hamid, 2018; Maryani & Nainggolan, 2019; Suaib & Nain, 2023).

Forum Anak kini hadir pada semua daerah di Indonesia. Berdasarkan data KPPPA, pada tahun 2021 sudah ada lebih dari 500 Forum Anak yang tersebar di berbagai wilayah. Termasuk kota Palembang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palembang memiliki organisasi forum anak tingkat kota yaitu Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA). Forum Anak Kota Palembang dibentuk pada tahun 2016 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak di Kota Palembang. Dasar hukum pembentukan Forum Anak ini adalah Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

FAKOPA telah melakukan banyak kegiatan seperti memimpin kampanye-kampanye anti kekerasan terhadap anak di ruang publik dan media sosial, mengadakan kegiatan sosialisasi tentang hak-hak anak di berbagai sekolah dan komunitas, mengikuti

pelatihan pelopor dan pelapor, dan ikut serta dalam rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang. Selain itu, Forum Anak juga berhasil mendorong beberapa kebijakan lokal yang ramah anak, seperti program sekolah inklusif yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar untuk anak-anak di seluruh kota. Pada hakekatnya, tujuan akhir dari FAKOPA adalah menjadikan Kota Palembang sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak seperti prinsip program kota layak anak yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Program ini terdiri dari lima tingkatan peringkat dengan standarisasi pengukuran skor melalui 24 indikator KLA yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun tingkatan peringkat KLA adalah Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan kategori Kota Layak Anak sepenuhnya. Setiap tingkatan mencerminkan sejauh mana kota/kabupaten tersebut telah melakukan persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan mengatasi kendala pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi indikator-indikator dari KLA melalui skor yang didapatkan selama evaluasi.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Palembang adalah ibukota dan merupakan kota yang memiliki jumlah anak-anak terbanyak se-Provinsi Sumatera Selatan menurut data dari Badan Pusat Statistik, yaitu sebanyak 564.254 orang anak. Selayaknya ibukota pada umumnya yang memiliki fasilitas penunjang kehidupan terbaik di hampir semua aspek, disamping itu Kota Palembang seharusnya menjadi contoh teladan bagi kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang salah satunya terkait program KLA. Oleh sebab itu, Kota Palembang telah berikrar untuk mewujudkan Kota Palembang yang Layak Anak. Komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk mewujudkan kota layak anak di bumi Sriwijaya ini diawali dengan dikeluarkannya jargon “Palembang Menuju Kota Layak Anak” pada tahun 2018 (Mahmud & Suandi, 2020). Namun kenyataannya hal tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan dikarenakan Kota Palembang baru mendapatkan peringkat pratama.

Peringkat KLA Kota Palembang tidak mengalami perubahan dan masih mendapatkan peringkat terbawah yaitu pratama. Sedangkan beberapa daerah lainnya bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi seperti contoh Kabupaten Muara Enim yang konsisten memperoleh peringkat nindya dan Kabupaten OKU Selatan yang mengalami kenaikan peringkat. Sebagai pembawa nama ibukota, Palembang kalah dengan beberapa kabupaten/kota lain dalam pelaksanaan KLA di Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palembang adalah dinas yang di berada ruang lingkup yang sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPAR) yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, terutama melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. Namun pemberdayaan dan program yang telah dilakukan masih belum cukup untuk menaikan peringkat Pratama KLA di Kota Palembang dari evaluasi tahun 2021 hingga sampai

penelitian ini dilakukan, maka dibutuhkan strategi pemberdayaan baru oleh DP3A Kota Palembang melalui FAKOPA dalam mendukung kenaikan peringkat program KLA di Kota Palembang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Riduwan (2013) menjelaskan bahwa studi literatur atau penelitian terdahulu berguna untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti tidak hanya terfokus pada hasil studi saat ini, tetapi juga pada perkembangan dan konteks yang telah terjadi. Penelitian berjudul “Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia” oleh Lawado & Na’imah (2018) menemukan bahwa kehadiran forum merupakan suatu peluang dan tantangan bagi anak dalam mengaktualisasikan hak partisipasinya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya. Penelitian berjudul “Kapabilitas Forum Anak Dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak Di Dalam Program Kota Layak Anak Di Kota Padang” oleh Fadhillah & Fajri (2023) menemukan bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan FORANDANG di dalam Program KLA yaitu kegiatan sosialisasi hak dan perlindungan anak, kampanye hak dan perlindungan anak, FGD dengan Pemerintah terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, Serta melakukan audiensi untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Penelitian berjudul “Peran Forum Anak Dalam Upaya Membantu Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru” oleh Ramadhan (2023) menemukan bahwa peran forum anak dalam upaya mewujudkan kota layak anak masih belum optimal. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan anggaran yang masih terbatas. Penelitian berjudul “Optimalisasi Peran Forum Anak dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembang” oleh Jannah et al. (2022) menemukan bahwa kurang optimalnya terlihat pada peran pelopor sebagai agen perubahan yang belum berhasil mengajak masyarakat terlibat dalam melakukan perubahan yang lebih baik bagi anak sedangkan peran pelapor hanya separuh dari pemenuhan hak anak yang baru dilaporkan. Maka dalam hal ini diperlukan saran untuk meningkatkan peran Forum Anak. Penelitian berjudul “Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” oleh Arifin et al. (2024) menemukan bahwa optimalisasi peran Forum Anak Desa dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak Desa Lembengan sudah dijalankan meskipun kurang begitu optimal dalam menjalankan mensosialisasikan kebijakan kota layak anak dikarenakan minimnya pemahaman warga mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Penelitian berjudul “*Key Factors for Child Participation – An Empowerment Model for Active Inclusion in Participatory Processes*” oleh Olsen (2023) menemukan bahwa keempat dimensi model, informasi, otonomi, pengakuan, dan aliansi disajikan sebagai pilar bagi inklusi anak yang aktif dan nyata dalam proses partisipasi. Penelitian berjudul “*Computational Empowerment of Children: Design Research on Empowering and Impactful Designs by Children*” oleh Iivari et al. (2023) menemukan bahwa melalui pendekatan desain kritis dan pembuatan teknologi, anak-anak dapat menciptakan solusi yang memberdayakan untuk masalah sosial seperti perundungan serta menghasilkan dampak jangka panjang dalam pengembangan teknologi digital. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan teoretis untuk memperkuat kerangka penelitian ini serta mengidentifikasi gap penelitian terkait Strategi Pemberdayaan Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Identifikasi gap penelitian oleh penulis membuka peluang untuk menemukan aspek kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya, melalui Teori strategi pemberdayaan dari Hulme dan Turner (1990) dalam Karjuni Dt Maani (2011). Fokus utama penelitian ini terletak pada Forum Anak Kota Palembang dan orientasinya dalam Program Kota Layak Anak. Terdapat perbedaan objek penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Olsen (2023) dan Iivari et al. (2023), yaitu penelitian tersebut lebih fokus pada generalisasi hasil studi. Terdapat perbedaan teori yang digunakan dan lokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Lawado & Na'imah (2018), Fadhillah & Fajri (2023), Ramadhan (2023), Jannah et al. (2022), Olsen (2023) dan Iivari et al. (2023). Lokasi penelitian ini lebih spesifik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan dan faktor penghambat strategi pemberdayaan Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mendukung program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. lingkup pembahasan penelitian ini adalah terkait strategi pemberdayaan masyarakat dari Forum Anak menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat menurut Hulme & Turner (1990) yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi, yaitu *empowerment approach*, *development approach*, dan *welfare approach*. Sumber data dari penelitian ini akan dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak fasilitator Forum Anak Kota Palembang yaitu Dinas PPPA Kota Palembang dan Forum Anak Kota Palembang. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling* yang terdiri atas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Sub Koordinator Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, Ketua Forum Anak Kota Palembang, dan Anggota Forum Anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles & Huberman (2014) yang terdiri atas *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2025 yang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2024/2025.

III. HASIL/PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemberdayaan Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang

Berkaitan dengan fenomena yang dikaji penulis, yaitu tentang analisis strategi pemberdayaan FAKOPA oleh DP3A dalam mendukung program KLA. Fakta dan data yang penulis sajikan diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung. Dalam menganalisis penelitian ini bersifat teoritis, penulis menggunakan konsep implementasi milik Suharto (2010:58) untuk menganalisa bagaimana pemberdayaan yang dilaksanakan DP3A melalui pendekatan teori strategi pemberdayaan dari Hulme & Turner (1990) di Kota Palembang yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Adapun teori ini menyebutkan 3 (tiga) dimensi yaitu:

3.1.1 *The Empowerment Approach*

Merupakan pendekatan yang memberdayakan untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat melalui proses politik. Hukum merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan baik di Pemerintahan maupun dilingkungan masyarakat. Hukum sangat penting untuk menjadi perlindungan ketika masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Indikator *The Empowerment Approach* adalah:

a. Regulasi atau Kebijakan Tentang Organisasi FAKOPA

FAKOPA memiliki regulasi yang kuat sebagai payung hukum dalam menjalankan kegiatan organisasi. Selain itu, selama peneliti turun langsung ke lapangan dalam rangka kegiatan penelitian, peneliti mendapatkan informasi tambahan bahwa Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah bidang yang memegang kendali atas FAKOPA. Bapak Deddy Putra Pratama, S.E dan Bapak Eka Prasetya Ervian, S.E, sendiri merupakan mentor yang cukup sering turun langsung mendampingi kegiatan FAKOPA.

b. Regulasi atau Kebijakan Tentang Program Kota Layak Anak

KLA adalah sebuah program Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang memerintahkan semua daerah di Indonesia harus mengikuti pengembangan daerah yang layak bagi anak. KLA merupakan tugas bagi segenap lembaga yang ada di Kota Palembang, sehingga dibutuhkan kerjasama dan gotong royong agar KLA dapat dijalankan dengan baik. Adapun peringkat Kota Palembang diharapkan berada di peringkat tertinggi di Sumatera Selatan. Akan tetapi mulai dari penilaian awal hingga saat penelitian ini dilakukan, peringkat KLA kota Palembang selalu terperangkap di peringkat pratama. Kurangnya data yang dibutuhkan untuk pelaporan disetiap indikator KLA membuat peringkat Kota Palembang tidak mengalami kenaikan. Selain itu, kurang responsifnya masyarakat terhadap KLA, membuat FAKOPA kesulitan untuk melakukan pelaporan di lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat umum.

Setelah melakukan analisis pada transkrip wawancara terhadap kebijakan KLA, dapat disimpulkan bahwa KLA merupakan tugas segenap pemerintah Kota Palembang berdasarkan keputusan walikota. Setiap lembaga wajib mengikuti ketentuan dalam pembagian gugus tugas, dimana hasilnya akan dilaporkan kepada DP3A sebagai dinas yang berperan secara langsung dalam program KLA. Dalam DP3A, seluruh bidang memiliki tugas terhadap KLA yang dibagi setiap bidang untuk memegang satu klaster.

Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan gugus tugas dan bantuan dari FAKOPA tidak berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak kendala yang membuat program KLA sulit untuk dijalankan. Maka dari itu, penulis berharap penelitian kali ini dapat memberikan hasil jawaban dari hambatan yang ada.

3.1.2 *The Development Approach*

Merupakan pemberdayaan pembangunan dalam peningkatan kemampuan, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat adalah suatu tindakan untuk memberikan kekuatan kepada suatu masyarakat agar dapat

memperjuangkan kelangsungan hidup mereka. Dalam organisasi kemampuan adalah hal penting untuk terus mempertahankan organisasi tersebut. Adapun pada dimensi ini, penulis menuangkan dua hal yaitu :

a. Pemberian Pelatihan dan Pembinaan untuk FAKOPA

Pelatihan dan pembinaan untuk FAKOPA telah diberikan oleh DP3A melalui banyak kegiatan. Ini diberikan dalam rangka pemberian ilmu sebagai dukungan mereka dalam melakukan kegiatan forum. Kegiatan dilakukan dalam bentuk *Capacity Building*. DP3A telah memberikan pembelajaran untuk FAKOPA dalam mendukung organisasi.

b. Diikutsertakan dalam Acara Pemerintah Terkait Program yang Berhubungan dengan Anak

Dalam berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah, seringkali FAKOPA diundang sebagai tamu maupun pengisi acara. DP3A telah berusaha keras untuk memberdayakan FAKOPA kedalam pemerintahan dan masyarakat, namun ada beberapa kendala yang dihadapi FAKOPA untuk ikut serta dalam kegiatan. Selama ini DP3A telah berusaha memberikan berbagai dukungan bagi FAKOPA, namun tetap saja ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan pemberdayaan FAKOPA oleh DP3A sedikit mengalami kesulitan.

Secara keseluruhan bahwa dalam indikator ini, DP3A telah melakukan berbagai macam pendekatan kepada FAKOPA agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana mestinya. Namun, berbagai kendala yang muncul saat implementasi kebijakan tetap tidak bisa dihindari. Jika permasalahan ini tidak segera dicarikan solusi, FAKOPA akan kesulitan dalam berkontribusi kepada kegiatan pemerintah. Maka dari itu, harus ada strategi baru yang bisa menjadi solusi yang baik bagi setiap pihak tanpa merugikan siapapun. Seperti contoh mulai dilakukan time management bagi anggota FAKOPA dalam menghindari tabrakan jadwal antara sekolah, les, dan organisasi.

3.1.3 *The Welfare Approach*

Merupakan pendekatan manusia yang mengarah kepada memperkuat pemberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh potensi lokal masyarakat itu sendiri. Dengan mengetahui potensi suatu organisasi, dapat memperkuat posisi organisasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini penulis melampirkan dua indikator, yaitu:

a. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi FAKOPA di Kota Palembang

Dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan, DP3A selalu mendampingi FAKOPA dalam melakukan program kerja organisasi yang diinisiasi oleh FAKOPA. Dalam setiap program, FAKOPA selalu mendapatkan pendampingan dan bantuan oleh DP3A. Dari pengamatan yang telah dilakukan penulis, dalam indikator *The Welfare Approach* yaitu pemberdayaan berdasarkan kemampuan dari dalam organisasi dapat disimpulkan bahwa DP3A telah melakukan indikator ini dengan sebaik yang bisa dilakukan. DP3A memberikan kebebasan bagi FAKOPA untuk merencanakan program kegiatan FAKOPA secara mandiri, kemudian dalam prosesnya pelaksanaan DP3A akan melakukan pendampingan serta pemberian bantuan dan bimbingan yang terbaik bagi FAKOPA agar implementasi kegiatan sesuai dengan perencanaan.

b. Pemberian Dukungan kepada FAKOPA sebagai Pejuang Hak Anak Palembang

Berbagai dukungan kepada FAKOPA oleh DP3A telah diberikan seperti contoh pendampingan pada setiap acara FAKOPA, pemberian pengetahuan dasar terkait KLA, forum anak, public speaking dan manner, pengundangan FAKOPA di berbagai acara resmi pemerintah, dan usaha untuk menghubungkan FAKOPA dengan pihak luar yang dapat mendukung mereka dengan cara kerjasama. Kerjasama ini diharapkan akan

membantu FAKOPA mengumpulkan anggaran dan fasilitas tambahan yang dibutuhkan dalam program kegiatan organisasi. Selama ini DP3A telah berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi lainya, namun untuk lembaga diluar instansi pemerintah, sampai saat ini belum ada yang terjadi.

Setelah melakukan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa DP3A telah melakukan berbagai dukungan dalam memberdayakan FAKOPA, namun ada satu usaha yang belum direalisasikan hingga saat ini yaitu bekerjasama dengan pihak luar pemerintah yang diyakini dapat membantu FAKOPA dari segi finansial. DP3A berharap di kemudian hari akan terwujudnya kerjasama tersebut agar program kerja FAKOPA bisa direalisasikan semua tanpa terkendala dana yang terbatas.

3.2 Faktor Penghambat Strategi Pemberdayaan Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat upaya DP3A dalam melaksanakan strategi pemberdayaan FAKOPA dalam mendukung KLA di Kota Palembang, antara lain sebagai berikut.

3.2.1 Kurangnya Dana yang Tersedia dalam Kegiatan FAKOPA Untuk Mendukung KLA

Dana untuk modal program kegiatan FAKOPA pada dasarnya berasal dari DP3A yang dianggarkan setiap tahunnya, namun dalam implementasinya anggaran untuk FAKOPA sulit untuk dicairkan karena berbagai alasan. Kurangnya dana ini mengakibatkan banyak program FAKOPA yang belum bisa direalisasikan. Bahkan beberapa dari kegiatan yang telah dilaksanakan dipilih berdasarkan biaya terendah. Seringkali pihak ASN sebagai fasilitator mengeluarkan uang pribadi mereka secara sukarela untuk mendukung FAKOPA daripada harus menunggu kejelasan anggaran resmi dapat turun. FAKOPA adalah organisasi yang terdiri dari anak-anak maka dari itu fasilitator tidak mau membebani biaya program FAKOPA kepada anggotanya. Adapun biaya yang harus anggota FAKOPA keluarkan untuk organisasi hanya Rp. 10.000/Anak dalam satu bulan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seperti perlengkapan alat tulis FAKOPA. Lebih dari itu, fasilitator tidak akan membebani kepada anak-anak.

Setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan anggaran adalah kendala bagi FAKOPA untuk menjalankan program kegiatan organisasi, dimana FAKOPA diwajibkan untuk melakukan kegiatan minimal satu kali dalam kurun satu bulan. Namun fasilitator DP3A tetap berusaha yang terbaik dalam memberikan pendampingan seperti melakukan sumbangan secara sukarela oleh para ASN di DP3A untuk dijadikan modal bagi FAKOPA agar dapat mencapai target bulanan dan membimbing FAKOPA untuk melakukan program-program yang sederhana. Program-program tersebut antara lain sosialisasi, kunjungan ke sekolah, ataupun melakukan penyebaran poster yang berkaitan dengan hak anak di platform digital seperti Instagram @Forumanakpalembang.

3.2.2 Kurangnya Partisipasi Pihak Eksternal Dalam Mendukung FAKOPA dan KLA di Kota Palembang

Dalam pelaksanaan FAKOPA dan KLA dibutuhkan segenap partisipasi dari berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat dan lembaga umum yang ada di Kota Palembang. Namun, menurut pengakuan Ibu Dra. Yeni Mariani, M.Si., hanya sedikit

masyarakat umum Kota Palembang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Menurut Ibu Dra. Hj. Yuli Riati, M.M., baik KLA maupun FAKOPA masih kurang dikenal masyarakat luas sehingga menyebabkan kurangnya data pemenuhan hak anak dan pelaporan terkait masalah anak yang diperlukan untuk pemenuhan indikator KLA. Bahkan lembaga dinas lain yang masih bersentuhan dengan dunia anak seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya masih kesulitan untuk memberikan data yang lengkap kepada DP3A. Dengan begitu FAKOPA pun akan sulit melakukan tugas sebagai pejuang hak anak Kota Palembang.

Hambatan kedua ini menyebabkan FAKOPA dan DP3A sebagai fasilitator kesulitan untuk melakukan interaksi dengan masyarakat lain ataupun mendapatkan data yang dibutuhkan sehingga menentukan fokus dari program kegiatan yang akan dilakukan. Perlu adanya promosi agar FAKOPA lebih dikenal sehingga dapat mempermudah FAKOPA dalam menjalankan tugasnya sebagai pendukung KLA. Jika semua data terkait indikator KLA dapat dikumpulkan secara lengkap, akan menambah kesempatan peringkat KLA di Kota Palembang akan mengalami kenaikan. Bapak Eka Prasetya Ervian, S.E, selaku fasilitator FAKOPA juga menyetujui pendapat dari Bu Yuli dan Bu Yeni bahwasanya kurangnya eksistensi dari program KLA dan FAKOPA menyebabkan partisipasi dari masyarakat dan lembaga lain tidak begitu besar sehingga membuat data yang dibutuhkan KLA tidak dapat terpenuhi. Hal ini menyebabkan FAKOPA kesulitan dalam mendukung program KLA di Kota Palembang.

3.2.3 Banyaknya Anggota FAKOPA Tidak Dapat Mengikuti Kegiatan Forum Anak Dan KLA

DP3A telah mengupayakan berbagai strategi pemberdayaan terhadap Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA), namun pada praktiknya partisipasi aktif seluruh anggota dalam berbagai kegiatan masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat dua faktor utama yang menghambat keikutsertaan anggota, yaitu keterbatasan waktu karena status mereka sebagai pelajar, serta hambatan mobilitas yang berkaitan dengan izin orang tua, akomodasi transportasi, dan keterbatasan finansial.

Sebagian besar anggota FAKOPA merupakan pelajar aktif pada jenjang SD, SMP dan SMA, sehingga kewajiban utama mereka adalah belajar. Padatnya kegiatan akademik, seperti tugas sekolah, kerja kelompok, ujian, hingga jadwal les tambahan, menyebabkan waktu mereka untuk terlibat dalam kegiatan FAKOPA menjadi sangat terbatas. Tidak jarang kegiatan FAKOPA harus disesuaikan dengan jadwal sekolah anggota agar tidak mengganggu proses pendidikan formal mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa status sebagai pelajar sangat memengaruhi intensitas keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi. Pembina dari DP3A pun mengakui bahwa pendekatan mereka harus fleksibel dalam menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak bertabrakan dengan agenda sekolah.

Selain Keterbatasan waktu, faktor mobilitas juga menjadi hambatan utama yang dihadapi para anggota FAKOPA. Sebagai anak-anak yang belum mandiri secara penuh, mereka masih sangat tergantung pada izin orang tua, waktu yang diperbolehkan keluar rumah (jam malam), serta ketersediaan akomodasi dan uang saku. Kegiatan yang dilaksanakan di luar sekolah seringkali memerlukan biaya transportasi tambahan, sementara tidak semua anggota berasal dari latar belakang keluarga yang mampu. Kondisi ini mengakibatkan kehadiran anggota dalam acara seringkali tidak merata, bahkan berkurang drastis jika lokasi acara jauh dari pusat kota atau diadakan pada malam hari.

Ketua FAKOPA juga menambahkan bahwa kendala izin orang tua dan keterbatasan transportasi sangat sering terjadi.

Kendala ini juga disadari oleh pihak DP3A yang memahami sepenuhnya kondisi tersebut karena para anggota masih di bawah umur dan belum dapat bepergian secara mandiri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu karena kewajiban sekolah serta kendala mobilitas menjadi dua hambatan signifikan dalam keterlibatan aktif anggota FAKOPA. Kondisi ini menuntut strategi yang lebih adaptif dan kolaboratif dari DP3A, misalnya melalui penjadwalan yang fleksibel, pemberian akomodasi transportasi, serta pendekatan komunikasi yang persuasif kepada orang tua. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan anggota sebagai anak-anak, diharapkan pemberdayaan FAKOPA dapat berjalan lebih optimal dan partisipasi mereka dalam mendukung program KLA semakin meningkat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini yaitu strategi pemberdayaan DP3A melalui *Empowerment Approach* menunjukkan adanya dasar hukum organisasi FAKOPA melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2016. Namun, belum tersedia regulasi turunan yang memperkuat peran dan mekanisme kerja FAKOPA secara strategis dalam pembangunan daerah. Adapun Regulasi terkait program KLA berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2018, dimana ditekankan bahwa penyelenggaraan KLA adalah tugas segenap pemerintahan Kota Palembang, namun masih bersifat umum dan luas serta belum secara eksplisit melibatkan FAKOPA sebagai aktor utama dalam implementasi program.

Dari segi *Development Approach* DP3A telah memberikan berbagai program pelatihan dan pembinaan, seperti melalui kegiatan *Capacity Building* pada September 2024. Pelatihan yang diberikan selalu mencakup hal yang berkaitan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan seperti pengembangan keterampilan *public speaking*, *manner*, dan pemberian pengetahuan tentang isu-isu penting seperti bullying, stunting, kekerasan, narkoba, bahaya rokok, *cyber crime*, dan pentingnya pendidikan. Selain pelatihan formal, DP3A juga memberikan pembinaan aktif melalui *mentoring*, pengawasan organisasi, koordinasi dengan dinas atau masyarakat, serta penyusunan program kerja dengan evaluasi rutin bulanan. FAKOPA aktif dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan sebagai tamu maupun pengisi acara, menunjukkan adanya upaya nyata dari DP3A untuk memberdayakan mereka di tengah masyarakat. Meski demikian, keterlibatan FAKOPA masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu karena status mereka sebagai pelajar, kendala akomodasi, serta perizinan dari orang tua.

Dari segi *Welfare Approach*, DP3A secara konsisten mendampingi FAKOPA dalam setiap tahap pelaksanaan program kerja, mulai dari perencanaan hingga implementasi. DP3A tidak hanya memberikan kebebasan bagi FAKOPA untuk merancang program secara mandiri, tetapi juga memberikan dukungan berupa fasilitas, izin, dan kebutuhan logistik lainnya. DP3A telah memberikan berbagai bentuk dukungan nyata bagi FAKOPA, mulai dari pendampingan kegiatan, pembekalan pengetahuan, hingga penghubung dengan instansi pemerintah lain. Namun, upaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak di luar pemerintahan, seperti lembaga swasta atau BUMD, masih belum membuahkan hasil. Kendala utamanya adalah perbedaan orientasi tujuan dan persepsi terhadap FAKOPA sebagai organisasi anak-anak. Meski demikian, DP3A tetap berharap kolaborasi dengan pihak luar dapat terwujud di masa depan guna menunjang pendanaan dan keberlangsungan program FAKOPA.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lawado & Na'imah (2018), Ramadhan (2023), Arifin et al. (2024) yang Kehadiran Forum Anak merupakan

peluang sekaligus tantangan bagi anak dalam mengaktualisasikan hak partisipasinya, namun peran forum tersebut dalam mewujudkan Kota Layak Anak, khususnya di Desa Lembengan, masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan anggaran, serta minimnya pemahaman warga mengenai tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Iivari et al. (2023) dan Olsen (2023) yang memiliki perbedaan fokus penelitian. Hasil penelitian Iivari et al. (2023) lebih berfokus pada model informasi, otonomi, pengakuan, dan aliansi dalam pemberdayaan anak. Hasil penelitian Olsen (2023) berfokus pada pembahasan terhadap pendekatan teknologi digital dalam pemecahan masalah anak, seperti perundungan dan sejenisnya. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah & Fajri (2023) dan Jannah et al. (2022) yang menghasilkan temuan tentang peran advokasi dan kebijakan dalam implementasi KLA.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Strategi pemberdayaan Forum Anak Kota Palembang (FAKOPA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan, pengembangan, dan kesejahteraan, dengan dasar hukum berupa Peraturan Walikota No. 62 Tahun 2016 dan Perda No. 8 Tahun 2018, meskipun regulasi tersebut belum sepenuhnya mengatur secara spesifik peran strategis FAKOPA dalam pembangunan Kota Layak Anak (KLA). Dalam pendekatan pengembangan, DP3A telah menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan seperti Capacity Building yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan anggota FAKOPA, serta memberikan bimbingan rutin dalam penyusunan dan evaluasi program kerja. FAKOPA juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan isu anak, namun partisipasi mereka masih terkendala oleh faktor waktu, izin orang tua, dan akses akomodasi. Melalui pendekatan kesejahteraan, DP3A memberikan pendampingan penuh dan dukungan logistik untuk mendukung kemandirian FAKOPA dalam menjalankan kegiatan, meskipun kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD belum optimal akibat perbedaan persepsi. Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan ini menghadapi hambatan seperti keterbatasan dana, minimnya dukungan eksternal, dan tidak maksimalnya partisipasi anggota FAKOPA dalam kegiatan, yang perlu diatasi agar keberlangsungan program KLA dapat tercapai lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini lebih terkonsentrasi pada Forum Anak Kota Palembang dan realisasi Kota Layak Anak di Kota Palembang. Penelitian ini terbatas di lingkungan Kota Palembang Selain itu, keterbatasan waktu dan anggaran penelitian turut berdampak pada ruang lingkup pembahasan masalah penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih berada pada tahap awal sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih kompleks, sehingga penulis menyarankan agar 1. DP3A perlu melakukan kampanye dan sosialisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus dan lebih kreatif untuk menarik perhatian masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan program FAKOPA untuk mendukung KLA di Kota Palembang. Kampanye dan sosialisasi ini dapat memanfaatkan berbagai saluran, seperti media sosial, media massa, dan melalui komunitas. Diperlukan penelitian lanjutan berkaitan dengan strategi pemberdayaan Forum Anak guna mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palembang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan adanya dedikasi, kerja keras, dan dukungan dari berbagai elemen, penelitian ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan temuan yang diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik, khususnya di sektor pemberdayaan anak dan perempuan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan program – program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan anak dan perempuan di Kota Palembang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Khotimah, K., & Dayar, M. B. (2024). Optimalisasi Peran Forum Anak Desa dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *JURNAL PARADIGMA MADANI : Ilmu Sosial, Politik Dan Agama*, 11(2), 81–90. <https://doi.org/10.56013/JPM.V11I2.3476>
- Fadhillah, D. F., & Fajri, H. (2023). Kapasitas Forum Anak Dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak Di Dalam Program Kota Layak Anak Di Kota Padang. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2>
- Gauthier, A., Vasalou, A., Londoño, A. T., Wu, N., & Konyani, B. (2025). Empowering Young Environmental Leaders: Designing Interactive Data Visualisation to Foster Children’s Agency in Eco-Schools. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 100749. <https://doi.org/10.1016/J.IJCCI.2025.100749>
- Goto, A., Williams, A. L., Okabe, S., Koyama, Y., Koriyama, C., Murakami, M., Yui, Y., & Nollet, K. E. (2022). Empowering Children as Agents of Change to Foster Resilience in Community: Implementing “Creative Health” in Primary Schools after the Fukushima Nuclear Disaster. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2022, Vol. 19, Page 3417, 19(6), 3417. <https://doi.org/10.3390/IJERPH19063417>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Hebert, S. T., Descary, G., Potvin, J. C., & Jobin, P. (2023). Exploring Empowerment from the Perception of Child Welfare Practitioners: Opening a New Time Horizon. *Residential Treatment for Children and Youth*, 40(1), 109–129. <https://doi.org/10.1080/0886571X.2022.2082627>
- Hulme, D., & Turner, M. M. (1990). *Sociology and Development: Theories, Policies and Practices*. Harvester Wheatsheaf.
- Iivari, N., Ventä-Olkkonen, L., Hartikainen, H., Sharma, S., Lehto, E., Holappa, J., & Molin-Juustila, T. (2023). Computational empowerment of children: Design research on empowering and impactful designs by children. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 37, 100600. <https://doi.org/10.1016/J.IJCCI.2023.100600>
- Jannah, M., Amaliatulwalidain, & Kariem, M. Q. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Palembang. *Governance*, 10(2), 65–76. <https://doi.org/10.33558/GOVERNANCE.V10I2.5640>

- King, V., Killaspy, E., & Perks, R. (2024). Empowering young people with additional needs to prepare for adulthood: an occupational therapist's view. *Paediatrics and Child Health*, 34(7), 222–227. <https://doi.org/10.1016/J.PAED.2024.04.004>
- Lawado, I. S., & Na'imah, N. (2018). Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia. *EGALITA*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/EGALITA.V13I1.8078>
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36–52. <https://doi.org/10.48093/JIASK.V2I2.23>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Nasriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Olsen, R. K. (2023). Key factors for child participation – an empowerment model for active inclusion in participatory processes. *Frontiers in Psychology*, 14, 1247483. <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2023.1247483/BIBTEX>
- Ramadhan, M. A. (2023). *Peran Forum Anak Dalam Upaya Membantu Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riduwan. (2013). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta.
- Seraphin, H., Yallop, A. C., Seyfi, S., & Hall, C. M. (2022). Responsible tourism: the 'why' and 'how' of empowering children. *Tourism Recreation Research*, 47(1), 62–77. <https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1819109>
- Smolarczyk, K., Birnbaum, L., Christ, A., & Kröner, S. (2024). Children's and adolescents' engagement with music and the potential for (digital) empowerment processes: A text-mining-supported scoping review. *Psychology of Music*. <https://doi.org/10.1177/03057356241241535>
- Suaib, S., & Nain, U. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). CV Adanu Abimata.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama.